

## BPK Siap Periksa Mobdin Dewan

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Tengah mengaku siap memeriksa penganggaran sekaligus penggunaan mobil dinas anggota DPRD Jateng. Jika cukup bukti dan ada yang melaporkan, BPK akan memeriksa hingga tuntas. Kasubag hukum dan humas BPK RI perwakilan Jateng, Supriyono Hadi menyatakan, pihaknya siap memeriksa jika cukup bukti dalam pengadaan mobdin di DPRD Jateng itu. Dia menegaskan, memang betul anggota dewan tak berhak mendapat fasilitas mobdin beserta anggaran operasionalnya.

"Oh iya, kalau sesuai kedudukannya kan yang punya fasilitas mobdin itu hanya pimpinan dewan. Jadi pada prinsipnya anggota dewan itu tak berhak mendapat fasilitas mobdin beserta operasionalnya be-

rupa bensin dan anggaran perawatan," kata dia kepada *Wawasan*, Rabu (22/1).

Seperti diketahui ada 26 unit mobil Toyota Innova untuk fasilitas anggota dewan. Padahal dalam UU Nomor 27/2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II serta PP nomor 24/2004 tentang protokoler Pimpinan DPRD tak mengatur anggota DPRD bisa mendapatkan mobil dinas. Ke-26 mobil itu dari 108 mobil yang dibeli dari APBD Perubahan 2013. Kabarnya 26 unit itu pengadaannya ditiptkan pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Di antaranya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) serta Setda Provinsi Jateng.

Dengan adanya kabar itu,

Koordinator Masyarakat Anti-korups Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan melaporkan penganggaran itu ke BPK RI perwakilan Jateng. Menurutnya, penganggaran mobil dinas untuk anggota dewan itu sudah salah. "Intinya mobdin dewan salah. Ini sama persis dengan kasus di Provinsi Banten di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah merekomendasikan supaya mobil dinas untuk anggota dewan harus segera ditarik kembali. Dan MAKI juga akan melaporkan kasus ini ke BPK RI perwakilan Jateng," kata mantan politisi PPP itu.

### ■ Jadi Informasi

Supriyono Hadi menambahkan, ketika ada laporan awal dari masyarakat maka akan dijadikan sebagai awal informasi untuk menggali data yang sebenarnya. Kemudian setelah

data dinyatakan memenuhi, maka akan diperiksa mulai dari prosedur penganggaran hingga fakta riil di lapangan.

Meskipun demikian, pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai mobdin dewan ini. Pasalnya belum mengetahui persis proses pengadaan mobdin dewan itu. Jadi pihaknya hanya bisa berkomentar sesuai normatif. "Kalau belum pasti kasusnya kami belum berani berpendapat," ujarnya.

Plt Sekda Jateng Sri Puryono saat dikonfirmasi tak bisa berbicara banyak soal berapa anggaran untuk pengadaan mobdin itu. Dia hanya memeparkan pertanyaan itu supaya dipertanyakan kepada bagian keuangan. "Iya pak, maaf tolong lebih detailnya mohon tanyakan ke P Arif, kabiرو keuangan," kata Sri Puryono melalui pesan singkat (SMS). ■ *M10—sn.*